

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ANALISIS PESTEL

SUSTAINABLE TOURISM VILLAGES DEVELOPMENT STRATEGY IN INDONESIA: PESTEL ANALYSIS APPROACH

Angga Wijaya Holman Fasa*, Mahardhika Berliandaldo**, Ari Prasetyo***

*Direktorat Kajian Strategis, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gedung Wisma Antara Lt. 18, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Gambir - Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta –Indonesia; email: *awijayahf@gmail.com, **berli.parekraf@gmail.com, ***prasetyo.ari@gmail.com

Naskah diterima: 27 Mei 2022, direvisi: 25 Juli 2022,
disetujui: 5 Agustus 2022

Abstract

The national development policy's direction focuses on sustainable factors in all sectors, including tourism. The development of tourism villages that are mainstreaming community empowerment and active participation is one of the manifestations of this policy direction. However, the global Covid-19 pandemic harms accelerating the development of tourism villages. Strategic action is needed to find solutions to these problems. This study aims to identify, understand, and explain the urgency of developing sustainable tourism villages; and develop a strategy analysis of sustainable tourism village development. Qualitative methods with PESTEL and descriptive analysis are used to elaborate on research problems. Secondary data are sourced from relevant journals, research reports, regulations, and articles—the results of the study show two conclusions. First, sustainable village development must be implemented because it does not merely support the recovery of the post-pandemic sector and also efforts to support sustainable development goals. Second, the strategies needed to encourage this development are synergy and interconnectivity in implementing the six supporting aspects, namely political, economic, social, technological, environmental, and legal or regulation.

Keywords: tourism villages; development strategy; sustainability; PESTEL analysis

Abstrak

Arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan faktor berkelanjutan pada semua sektor, termasuk pariwisata. Pengembangan desa wisata yang bersifat mengarusutamakan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu manifestasi arah kebijakan tersebut. Namun demikian, kondisi pandemi Covid-19 yang bersifat global berdampak negatif terhadap akselerasi proses pengembangan desa wisata. Dibutuhkan langkah strategis berkesinambungan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan; dan menyusun analisis strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan. Untuk mengelaborasi hal tersebut, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan PESTEL analisis, dan deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal, laporan penelitian, regulasi, dan artikel yang relevan. Hasil studi menunjukkan dua hal. *Pertama*, pengembangan desa wisata berkelanjutan penting untuk diimplementasikan karena mendukung pemulihan sektor pariwisata pascapandemi yang berkesinambungan dan usaha pencapaian target pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, strategi yang dibutuhkan dalam mendorong pengembangan tersebut adalah sinergi dan interkoneksi dalam mengimplementasikan enam aspek pendukung, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau regulasi.

Kata kunci: desa wisata; strategi pengembangan; berkelanjutan; analisis PESTEL

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan produk wisata yang dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki desa, baik berupa masyarakat, alam, dan budaya

sebagai sebuah identitas yang memiliki daya tarik wisata.¹ Karena keunikan dan keragaman yang

¹ Bagus Sudibya, "Wisata Desa Dan Desa Wisata," *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), January (2018): 22–26, <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>.

dimiliki masing-masing desa, pengembangan desa wisata dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan atraksi atau daya tarik pariwisata Indonesia.² Selain dapat dijadikan strategi diversifikasi produk, karakteristik lain yang menjadikan desa wisata penting untuk diimplementasikan adalah aspek pelestarian budaya dan lingkungan hidup.³ Hingga tahun 2018, terdapat 1.734 desa wisata yang sebagian besar berlokasi di Jawa-Bali dan Sumatera.⁴

Pada perkembangannya, pandemi Covid-19 berdampak parah terhadap sektor pariwisata, di mana terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2020, tercatat kunjungan wisatawan mancanegara menurun sebesar 75,03% dari 16,11 juta kunjungan pada tahun 2019 menjadi 4,02 juta kunjungan. Secara agregat, pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga -2,07% pada tahun 2020.⁵ Kondisi ini pun berdampak pada aktivitas ekonomi desa wisata. Salah satu temuan studi mutakhir menunjukkan bahwa ditutupnya akses penerbangan ke Indonesia pada medio Maret 2020 mengakibatkan penurunan tajam jumlah wisatawan yang berkunjung dan masyarakat yang bekerja di bidang industri pariwisata diberhentikan atau dirumahkan sehingga berdampak pada menurunnya dan bahkan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa wisata.⁶

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19 terhadap sektor pariwisata global, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menyampaikan usulan arah kebijakan transformatif yang dapat dijadikan preferensi dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan afirmatif

terhadap pemulihan sektor pariwisata.⁷ Tujuan hal tersebut adalah untuk membangun kembali sektor pariwisata dengan fokus pada pemanfaatan dampaknya terhadap destinasi yang dikunjungi dan membangun komunitas dan bisnis yang lebih tangguh melalui inovasi, digitalisasi, keberlanjutan, dan kemitraan.⁸ Salah satu topik yang mengemuka dalam usulan tersebut adalah pengembangan desa wisata yang berimplikasi pada pemberian layanan di lokasi terpencil, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, menyediakan akses ke pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya dan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/SDGs).⁹

Usulan pemulihan sektor pariwisata tersebut pada prinsipnya berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah, di mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, desa wisata digunakan sebagai sarana membangun desa secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa, serta menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.¹⁰ Selain itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, pengembangan desa wisata menjadi program prioritas nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi.¹¹

Lebih lanjut, berkaitan dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*), arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 juga menitikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan selaras dengan pencapaian TPB/SDGs pada semua sektor termasuk pariwisata. Dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan tersebut, pada tataran kebijakan, telah diterbitkan

² T Prasetyo Hadi Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman," *Media Wisata*, 12(2), (2014).

³ *Ibid*

⁴ Vitria Aryani et al, *Buku Pedoman Desa Wisata*, 1st ed. (Jakarta: Deputy Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019).

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).

⁶ Dewa Ayu Made Lily Dianasari, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Fisik Di Desa Wisata Di Bali," *Jurnal Kepariwisata*, 20(2), September 18 (2021): 99–106, <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i2.469>.

⁷ United Nations, "Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism," United Nations, https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

¹¹ Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Permenparekraf 9/2021). Secara garis besar, regulasi ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada terciptanya pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya; dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, diketahui bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap tujuan-tujuan pada TPB/SDGs. Dampak pada tujuan 1 (tanpa kemiskinan), tujuan 2 (tanpa kelaparan), tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).¹² Kondisi tersebut pada gilirannya juga berimplikasi pada pengembangan desa wisata yang selaras dengan kerangka TPB/SDGs.¹³ Dengan demikian dibutuhkan langkah strategis untuk mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan usaha pemulihan sektor pariwisata pascapandemi Covid-19. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, dan lalu kemudian menyusun analisis dan strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan pada tataran atau skala nasional.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.¹⁴ Dalam penelitian

ini dijelaskan urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, lalu kemudian dilakukan analisis strategi dengan menggunakan pendekatan PESTEL (*political, economic, social, technological, environmental, dan legal*) analysis.¹⁵ Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis enam faktor eksternal yang dapat memiliki pengaruh besar pada pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, yaitu politik, ekonomi, sosiologis, teknologi, hukum dan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini berguna untuk untuk memahami faktor situasional, internal dan analisis eksternal.¹⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen laporan dan peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan untuk mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu urgensi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, dan strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan pada tataran atau skala nasional. Selanjutnya, data-data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif analitis dan disintesis sehingga dapat mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pengembangan desa wisata secara berkelanjutan

1. Perkembangan desa wisata di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), hingga tahun 2022 perkembangan

Approaches, Fifth edit (Los Angeles: SAGE Publications Sage CA, 2018).

¹⁵ Ihsan Yüksel, "Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis," *International Journal of Business and Management*, 7(24), November (2012). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n24p52>.

¹⁶ Virgil Nicula and Simona Spânu, "PESTEL Analysis Applied In Tourism Evaluation in Braila County," *Revista Economică*, 71(3), (2019): 54–68. <http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/71304nicula&spanu.pdf>; Marina Gregoric, "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)," (in Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry, University of Rijeka, Faculty of Tourism & Hospitality Management, 2014), 551.

¹² Badan Pusat Statistik, "Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021", Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/63225cc5ff4204d6e756b047/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2021.html>.

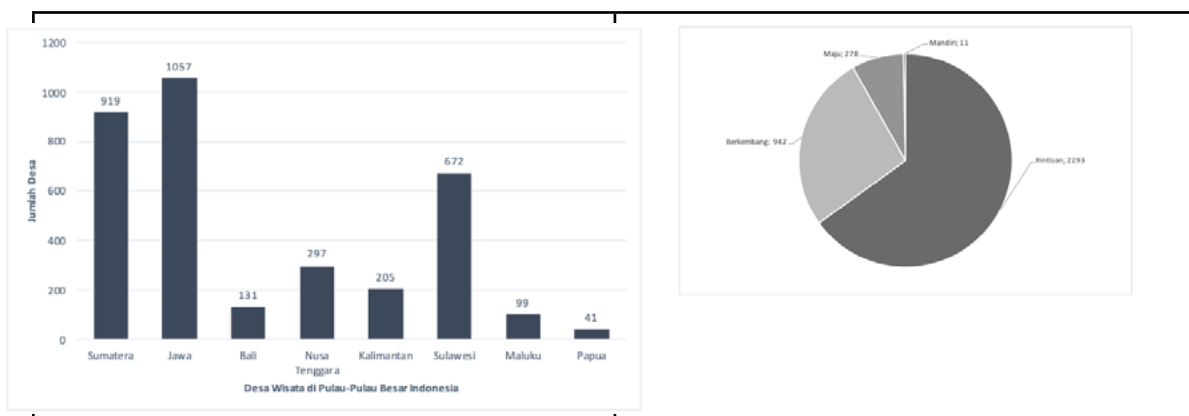
¹³ Aulia Rahmawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Dalam Mendukung SDG'S Desa," *Journal of Public Power*, 5(2), (2021): 151–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/jpp.v5i2.628>.

¹⁴ J. D. Creswell, J. W., & Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods

desa wisata di Indonesia telah mencapai 3.524 desa yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Desa wisata terbanyak berada di Pulau Jawa sebanyak 1.057 desa dengan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah desa wisata tertinggi daripada provinsi lainnya yakni sejumlah 310 desa yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Di tempat kedua dimiliki oleh Pulau Sumatera yang sejumlah 919 desa dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai penyumbang desa wisata terbesar yakni sejumlah 298 desa. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi dengan jumlah sebanyak 672 desa yang mayoritas berada di Sulawesi Selatan dengan jumlah 419 desa. Provinsi Sulawesi Selatan tersebut memiliki jumlah desa wisata terbanyak yang tersebar di seluruh Indonesia yang berada di 24 kabupaten/kota, sebagaimana terlihat pada gambar 1 dibawah ini.¹⁷

(Kab. Buleleng), dan Desa Wisata Namu (Kab. Konawe Selatan).¹⁸

Aspek penting dalam pengembangan desa wisata menuju desa wisata unggul atau mandiri dapat terlihat dari 3 struktur pengembangan yaitu, infrastruktur; higienis, kebersihan, dan kesehatan; serta kesiapan informasi teknologi dengan skema pendekatan 3A meliputi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.¹⁹ Selain itu, terdapat beberapa kriteria yang menjadikan suatu desa menjadi desa wisata yaitu araksi wisata; jarak tempuh; besaran desa; sistem kepercayaan dan kemasyarakatan; dan ketersediaan infrastruktur.²⁰ Kriteria-kriteria tersebut nantinya akan dikembangkan dalam konteks pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Pengembangan desa wisata dapat dilakukan oleh masyarakat serta unsur pemerintahan berdasarkan sumber daya desa yang dimiliki dengan beberapa alternatif wisata



Sumber: Data diolah dari Jaringan Desa Wisata Kemenparekraf

Gambar 1. Jumlah Desa Wisata dan Kategori Desa Wisata per April 2022

Berdasarkan data jumlah desa wisata tersebut, desa wisata yang masih dalam proses rintisan sebanyak 2.293 desa, berkembang 942 desa, maju 278 desa, dan mandiri sebanyak 11 desa. Kesebelas desa wisata mandiri berada di Desa Wisata Cibuntu (Kab. Kuningan), Desa Wisata Candirejo (Kab. Magelang), Desa Wisata Ngalenggeran (Kab. Gunung Kidul), Desa Wisata Blue Lagoon Tirta Budi (Kab. Sleman), Desa Wisata Dewi Sambi (Kab. Sleman), Desa Wisata Petingsari (Kab. Sleman), Desa Wisata Gubugjlahkah (Kab. Malang), Desa Wisata Pujon Kidul (Kab. Malang), Desa Wisata Penglipuran (Kab. Bangli), Desa Wisata Pemuteran

seperti wisata petualangan, wisata agro, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan sejarah, serta wisata kreatif.²¹

¹⁷ Kemenparekraf, "Jaringan Desa Wisata," Kemenparekraf. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/home>.

¹⁸ Kemenparekraf, "Jumlah Desa Wisata Mandiri," Kemenparekraf. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/kategori/74>.

¹⁹ Agnes Wirdayanti et al., *Pedoman Desa Wisata, II*, Juni 2 (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021).

²⁰ M. Antara and I.N.S. Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal* (Bali: Universitas Udayana, 2015); Selamat Joko Utomo and Bondan Satriawan, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang," *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), (2017).

²¹ Firman Syah, "Strategi Mengembangkan Desa Wisata," (Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional Multi

Pengembangan tersebut dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip pengelolaan yang menguntungkan serta melibatkan masyarakat setempat.²² Selain itu, pengembangan desa wisata dapat memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat dalam menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika yang sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan di desa tersebut.²³

Pada tataran ideal, desa wisata harus mampu berkomitmen pada visi pariwisata sebagai alat untuk transformasi positif, pembangunan inklusif dan berkelanjutan.²⁴ Selain itu juga, sebuah desa harus mampu mempromosikan dan melindungi alam dan budayanya serta menghargai gastronomi, kerajinannya dan orang-orangnya. Dalam tingkatan lainnya, sebuah desa harus mampu membina inovasi dan kewirausahaan, memberdayakan masyarakat, serta bekerja untuk kesejahteraan penduduk dan kenyamanan pengunjung. Karakteristik desa wisata memiliki konsep integrasi antara atraksi, akomodasi, dan pemenuhan fasilitas pendukung dalam suatu struktur masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi.²⁵

2. Keterkaitan pengembangan desa wisata dengan agenda TPB/SDGs

Pengembangan desa wisata secara berkelanjutan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atau

keberadaan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal. Konsep tersebut memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan dan tetap memperhatikan aspek sosial budaya.²⁶ Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menganut 3 aspek yaitu *economic (prosperity)*, *ecological (planet)*, dan *social & cultural (people)*.²⁷ Untuk menjamin keberlangsungan pariwisata berkelanjutan, pengembangan desa wisata seyogianya diselaraskan dengan tujuan pelaksanaan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Berikut ini adalah kontribusi pengembangan desa wisata dalam agenda pencapaian TPB/SDGs sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang masuk dalam program pengembangan desa wisata dengan 10 target pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung keberlangsungan pembangunan berkelanjutan tersebut, perlu dilakukan secara bersama-sama antar pemangku kepentingan agar dapat berkembang secara seimbang. Terkait dengan usaha pencapaian TPB/SDGs, tren pariwisata bergeser ke arah pelibatan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pariwisata.²⁸

Agar SDGs Nasional dapat diimplementasikan secara tepat guna, maka perlu disinergikan dengan SDGs desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020, SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian

Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (SENDI_U3), 2017).

²² G.S. Sastrayuda, Konsep Pengembangan Desa Wisata Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

²³ Wirdayanti et al., *Pedoman Desa Wisata*. Op. Cit.

²⁴ UNWTO, "Best Tourism Villages," (2021).

²⁵ M. F. Ma'ruf, B. Kurniawan, and R.P.A.G. Pangestu, "Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, 2017.

²⁶ Digna Merian. Andriyani and I. Nyoman. Sunarta, "Pengelolaan Desa Wisata Belimbing Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali," *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 3, No. 1, 2015.

²⁷ UNEP and UNWTO, "Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers," 2005.

²⁸ Irwan and Andi Agustang, "Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan," (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021 "Penguatan Riset, Inovasi, Dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19, 2021).

Tabel 1. Kontribusi Desa Wisata dalam Pengembangan TPB/SDGs

No.	Sustainable Development Goals	Target	Deskripsi
1.	SDGs 1. Mengurangi Kemiskinan	Target 1.4	menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
2.	SDGs 4. Pendidikan Berkualitas	Target 4.4	meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
3.	SDGs 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.6	melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
4.	SDGs 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Target 8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
		Target 8.9	menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
5.	SDGs 10. Berkurangnya Kesenjangan	Target 10.2	memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
6.	SDGs 11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Target 11.4	Melindungi warisan budaya dan warisan alam serta membuat masyarakat bangga pada wilayahnya
		Target 11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
7.	SDGs 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Target 12.2	mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
8.	SDGs 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	Target 17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Sumber: Data diolah dari <http://sdgsindonesia.or.id/>

tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya SDGs desa, maka arah tujuan pembangunan di desa khususnya desa wisata akan lebih terarah dan terukur untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. Pengembangan desa wisata dalam kerangka SDGs desa, adalah sebagai berikut:

- Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata
- Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital
- Pelatihan pengelolaan desa wisata;
- Pengelolaan desa wisata;

- Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata;
- Kegiatan pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan

Penelitian terkait penggunaan PESTEL Analysis dalam pengembangan Pariwisata telah banyak dilakukan di berbagai negara. Salah satu manfaat penggunaan PESTEL Analysis yakni dalam memilih target pasar baru, dengan memeriksa indikator pada aktor politik, ekonomi, sosial, teknologi,

lingkungan, dan hukum yang akan menjadi rencana awal ekspansi di bidang pariwisata terkait minat investasi.²⁹ Selain itu, menerapkan analisis PESTEL dalam pariwisata kita dapat memperoleh manfaat dari penilaian dan pemahaman tentang perilaku global permintaan pariwisata seperti halnya di negara Kroasia dan Qatar.³⁰ Di negara Turki, pengaruh legal memiliki peranan yang sangat penting dalam modal pengembangan pariwisata, selanjutnya faktor politik dan ekonomi memiliki kepentingan yang sama setelah *legal framework tourism* dan kemudian disusul oleh faktor teknologi, lingkungan, dan sosial.³¹

Selanjutnya, dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, penggunaan analisis PESTEL dapat bermanfaat bagi penguatan sektor pariwisata di masing-masing daerah. Pada penelitian ini, dalam kaitannya dengan analisis strategi, terdapat enam faktor dalam PESTEL analysis yang dielaborasi, yaitu 1) Politik, arah dan stabilitas hukum dan aturan di mana kita harus menentukan strategi-strategi yang terukur untuk menyeimbangkannya; 2) Ekonomi, sifat kondisi perekonomian wilayah; 3) Sosial, nilai dan gaya hidup yang berkembang akibat kondisi kultural, ekologi dan etnis; 4) Teknologi, sebagai inovasi untuk mengurangi keusangan; 5) *Environment*, hubungan timbal balik manusia dengan makhluk hidup lainnya dan 6) *Law*, regulasi yang bersifat memaksa di lingkungan tersebut.³²

1. Faktor Politik

Faktor ini ditentukan oleh intervensi pemerintah di bidang ekonomi dan pariwisata, melalui

kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan kepariwisataan nasional, serta kepatuhan terhadap standar internasional yang diberlakukan oleh UNWTO, dan organisasi besar dunia lainnya.³³ Selain itu, kebijakan peraturan perdagangan luar negeri dan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat mempengaruhi kondisi politik.³⁴ Stabilitas politik juga merupakan variabel yang sangat penting untuk diperhitungkan. Komponen politik didasarkan, khususnya, pada mode kerja sama antara dunia politik, yang diwakili oleh partai politik di pemerintahan dan lingkungan bisnis.

Stabilitas politik yang semakin kuat akan mendorong berbagai kegiatan usaha khususnya dunia pariwisata untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perbaikan dan pengelolaan destinasi di kawasan perdesaan akan segera dikembangkan. Upaya tersebut akan segera dilakukan untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan membawa pengaruh positif di daerah perdesaan. Pengembangan pariwisata masuk kedalam 7 agenda perubahan yaitu pada memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, untuk pengembangan wilayah sektor unggulan daerah seperti pada pedesaan berada dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.³⁵

Untuk mengakselerasi arah kebijakan tersebut, dibutuhkan percepatan pembangunan desa secara terpadu dalam rangka mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan cara: ³⁶ (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat

²⁹ Platon Nicolae, "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova," *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, XVIII(1), (2018).

³⁰ Marina Gregoric, "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)," *Op. Cit.*

³¹ ERGÜN KARA, "A Contemporary Approach For Strategic Management in Tourism Sector: PESTEL Analysis on The City Muğla, Turkey," *Journal of Business Research - Turk* 10, no. 2, 2018: 598–608, <https://doi.org/10.20491/isarder.2018.446>.

³² Jhon A. Pearce and Richard Robinson, Jr, *Strategic Management: Formulation, Implementation and Control*, 12th Ed, Jakarta: Mc Graw-Hill Education and Salemba Empat, 2013.

³³ Nicolae, "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova." *Op.Cit.*

³⁴ Gregoric, "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)." *Op. Cit.*

³⁵ Muhammad Agus Muljanto, "Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), (2021): 169–81, <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>.

³⁶ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). (n.d.).

desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (vi) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa. Program transformasi di setiap daerah dan desa tersebut dapat menggali potensi lokal yang dimiliki agar dapat dikembangkan dengan tujuan menambah nilai manfaat serta menghasilkan produktivitas ekonomi yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat³⁷. Selain itu juga, mampu menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta melestarikan dan memajukan sumber daya berupa alam, lingkungan, serta budaya lokal setempat. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat setempat dan lembaga lokal lainnya di Desa wisata harus menyadari cara untuk melindungi situs warisan arkeologis dan budaya mereka, agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.³⁸

2. Faktor Ekonomi

Transformasi yang sedang berlangsung dalam berbagai aspek pada sektor pariwisata mengarah pada peningkatan pentingnya pariwisata dalam pengembangan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dan memiliki efek sinergis terhadap penguatan sektor pariwisata. Secara umum, tingkat daya saing sektor pariwisata dan tingkat perkembangan sektor pariwisata adalah salah satu arah utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara.³⁹

Kontribusi sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat statistik (BPS) pada tahun 2021, nilai Produk Domestik Bruto Langsung Pariwisata/*Tourism Direct Gross Domestic Product* (TDGDP) dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yaitu dari 4,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 4,97 persen atau mencapai 1.734 triliun rupiah pada tahun 2019 yang mana menunjukkan kontribusi nilai tambah industri pariwisata terhadap seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) bagi perekonomian nasional.⁴⁰ Berikut ini pada tabel 2 ditunjukkan Kontribusi Sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional:

Tabel 2. Kontribusi Sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,13	4,11	4,5	4,8	4,05
Nilai Devisa Pariwisata	Milliyar USD	11,21	13,14	16,43	16,91	3,38
Indeks Daya Saing Pariwisata	Peringkat	-	#42	-	#40	-
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Juta	12,02	14,04	15,81	16,1	4,05
Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Juta	264,34	270,82	303,40	722,19	518,59

Sumber: Hasil Analisis Tim Penulis dari Data Kemenparekraf, 2022

Berdasarkan lima indikator tersebut, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional

³⁷ Haryo Limanseto, "Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi," Menko Perekonomian, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>.

³⁸ Jafar Abahre and Samer Raddad, "Impact of Political Factor on the Tourism Development in Palestine: Case Study of Sabastiya Village," *American Journal of Tourism Management*, 5(2), November 27 (2016): 29–35, <https://doi.org/10.5923/j.tourism.20160502.01>.

³⁹ Zubaira Temiraliyeva et al., "Economic Analysis and Factors Influencing the Development of Tourism," *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(8), (2021). <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/6655>.

⁴⁰ BPS, "Laporan Perekonomian Indonesia 2021," BPS, <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/17/f3ece7157064514772b18335/laporan-perekonomian-indonesia-2021.html>.

dapat terlihat pada PDB pariwisata dan nilai devisa pariwisata. Kontribusi PDB pariwisata selama lima tahun terakhir rata-rata berada di angka 4,32%. Selain itu, Jumlah penerimaan devisa terbesar pada sektor pariwisata terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 16,91 miliar USD dengan jumlah wisatawan mancanegara sejumlah 16,1 juta wisman. Peningkatan jumlah wisman juga di ikuti dengan peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara yang sejumlah 722,19 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019. Dengan adanya peningkatan tersebut, akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha desa wisata. Dalam proses pengembangan desa wisata, sumber pendanaan yang digunakan oleh desa ada 2 cara,⁴¹ yaitu sebagai berikut:

a. Penganggaran dan Pembiayaan Desa

Wisata yang dikelola desa berdasarkan kewenangannya di tetapkan dalam APBDesa yang sumber pendanaannya ditentukan oleh desa dalam musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan bidang lainnya yang mendukung kemajuan dari desa wisata tersebut.

b. Dana Desa

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa untuk digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan di desa. Terlebih terdapat fakta bahwa jumlah aloaksi anggaran dana desa dalam kurun waktu 2015-2019 meningkat secara signifikan dari sebelumnya sebesar 29.832,4 miliar Rupiah menjadi 111.840,2 miliar Rupiah.⁴² Kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan dana desa yaitu:

- Pembangunan desa adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang desa wisata.
- Pemberdayaan masyarakat desa adalah kegiatan pelatihan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran wisata bagi masyarakat desa.

⁴¹ Wirdayanti et al., Pedoman Desa Wisata. *Op. Cit.*

⁴² Robby Alexander Sirait and Emillia Octavia, "Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020," Analisis Ringkas Cepat, 01/ARC.PKA/III/2021, (2020).

3. Faktor Sosial

Faktor ini terdiri dari semua elemen yang terkait dengan pola perilaku individu dan kelompok yang mencerminkan sikap, nilai, kebiasaan, kesopanan. Faktor ini berisi informasi tentang: indikator demografis: pertumbuhan alami, struktur usia, mobilitas penduduk, kualitas tenaga kerja, tingkat pengangguran, tingkat migrasi, gaya hidup, tingkat pendidikan, sirkulasi bahasa asing, nilai-nilai masyarakat, toleransi terhadap agama, sikap terhadap kualitas dan tabungan.⁴³ Meskipun faktor-faktor yang dianalisis memiliki spesifisitas lokal yang maju, tren umum yang diamati di sejumlah besar negara dengan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata, salah satunya adalah terkait daya saing pariwisata nasional yang diukur melalui *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)*.

Indonesia sudah mencapai peringkat ke 40 dari target peringkat ke 30 pada tahun 2019. Secara umum nilai rata-rata indikator TTCI mendapatkan nilai 4,3.⁴⁴ Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait infrastruktur baik *air transport infrastructure, ground & port infrastructure*, maupun *tourist infrastructure*. Hal lainnya yang menjadi perhatian khusus adalah terkait *environmental sustainability, health & hygiene, safety & security, ICT readiness, business environment*, serta *human resources & labour market*.⁴⁵ Upaya perbaikan harus diakselerasi secara konsisten dan berkesinambungan, agar daya saing sektor pariwisata dapat meningkat.

Berkaitan dengan faktor sosial, jumlah tenaga kerja terus meningkat dari tahun 2015 – 2019, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 yaitu sejumlah 13 juta orang dengan proporsi 11,83%

⁴³ Nicolae, "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova." *Op. Cit.*

⁴⁴ WEF, "Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019," World Economic Forum, https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf.

⁴⁵ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. (n.d.).

terhadap jumlah tenaga kerja nasional.⁴⁶ Selaras dengan indikator TTCI, pengembangan tenaga kerja dari sektor pariwisata masih terus menjadi perhatian dari sisi kuantitas dan kualitas. Hal ini tercantum juga pada salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan SDM ini nantinya akan membantu dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Selain itu, peran komunitas dan SDM pariwisata membantu dalam meningkatkan progress pengembangan desa wisata di Indonesia. Beberapa komunitas yang sangat aktif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia antara lain: GenPI, GenWI, Pokdarwis, dan komunitas kreatif terkait lainnya.⁴⁷ Gerakan GenPI sebagai *community development* sendiri terbagi menjadi dua yaitu gerakan kreatif atau *creative values* dan Gerakan komersial atau *commercial values*. Selain itu, GenPI memiliki bentuk koordinasi yang melibatkan dan menghubungkan antara akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media.⁴⁸ Selain GenPI, GenWI dan komunitas Pokdarwis juga dapat menjadi jantung pemulihan sektor pariwisata dalam pengembangan desa wisata di Indonesia.

4. Faktor Teknologi

Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pengembangan desa wisata adalah teknologi berbasis digital dan hal tersebut dapat memberikan

manfaat positif bagi penyelenggaraan pariwisata.⁴⁹ Pengelolaan desa wisata yang baik dapat menjadi branding dalam peningkatan kunjungan pariwisata. Teknologi informasi juga membantu desa wisata dalam menjangkau calon pengunjung lebih luas ke seluruh Indonesia bahkan dunia.⁵⁰

Digitalisasi pada desa wisata dianggap dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi tentang suatu destinasi pariwisata di desa wisata dan tentunya dapat mengurangi biaya baik bagi pihak penyelenggara dan/pengelola, maupun bagi wisatawan.⁵¹ Transformasi digital pada desa wisata ini dapat mengubah bisnis desa wisata agar semakin optimal, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk dukungan promosi dan mendigitalisasi informasi-informasi pada desa wisata dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut dapat meningkatkan okupansi kunjungan wisatawan dengan tujuan mempermudah distribusi informasi kepada setiap calon potensial wisatawan yang akan berkenjung ke destinasi desa wisata.⁵²

Pemanfaatan teknologi digital lebih kepada penggunaan media sosial, *website*, dan *e-commerce*.⁵³ Media sosial digunakan pengelola desa wisata untuk dapat menarik minat pengunjung dan memberikan informasi-informasi tentang desa wisata dan juga *event-event* yang akan diadakan kepada masyarakat. Selain itu, *website* menjadi salah satu media iklan bagi pariwisata desa dan menunjukkan keberadaan desa wisata. *Website* juga sebagai media informasi untuk menawarkan produk-produk atau paket wisata yang disediakan desa wisata kepada

⁴⁶ BPS, "Jumlah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja (Persen), 2015-2019," BPS, <https://www.bps.go.id/indicator/6/1190/1/jumlah-pekerja-pada-industri-pariwisata-dalam-proporsi-terhadap-total-pekerja.html>.

⁴⁷ Kemenparekraf, "Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas," Kemenparekraf, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>.

⁴⁸ Muhammad Yahya Maulana and Sulistyowati, "Peran Generasi Pesona Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jawa Tengah Dengan Perspektif Community Development," *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), (2018). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21944>.

⁴⁹ Kumar S. and Shekhar, "Technology and Innovation: Changing Concept of Rural Tourism-A Systematic Review," *Open Geosci*, 12(1), (2020): 737-52.

⁵⁰ Ibnu Ananda and Teduh Dirgahayu, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata Di Indonesia: A Systematic Literature Review," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(4), Desember (2021): 2291-2302.

⁵¹ Ais Tsurayya Mumtaz and Mila Karmilah, "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata," *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), Maret (2021).

⁵² Nanda Dwi Putra and Teduh Dirgahayu, "Strategi Pemanfaatan TIK Untuk Promosi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta," (Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional Geotik, 2019), 206-218.

⁵³ C. Adhanisa and A. Fatchiya, "Efektivitas Website Dan Instagram Sebagai Sarana Promosi Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat," *Jurnal Sains Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat*, 1(4), (2017): 451-66.

pengunjung. Sedangkan pemanfaatan *e-commerce* lebih ditekankan untuk menjual produk kerajinan bambu, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan masyarakat desa. Beberapa parameter dalam pemanfaatan teknologi berbasis digital di berbagai desa wisata, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Informasi-informasi mengenai desa wisata
- 2) Terdapat media promosi *online*
- 3) Penawaran paket wisata pada desa wisata
- 4) Adanya sistem pemesanan tiket secara *online*
- 5) Tersedianya pemesanan tempat secara *online*
- 6) Sistem transaksi wisatawan selama di desa wisata
- 7) Kritik, Masukan, saran bagi pengelola desa wisata

infrastruktur pariwisata.⁵⁵ Pembangunan pariwisata wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, Hal ini dikarenakan menyangkut kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan wisata berbasis lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumberdaya yang lestari.⁵⁶ Namun demikian, Permenparekraf 9/2021 telah memberikan panduan bahwa pengelolaan lingkungan pada masing-masing destinasi dapat dilaksanakan pengelolaan limbah dan emisi dengan berbagai kriteria sesuai tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Kriteria pengelolaan limbah dan emisi

No.	Kriteria	Deskripsi
1.	Air limbah	Destinasi memastikan bahwa limbah ditangani dengan baik dan dipakai-ulang atau dibuang dengan aman tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan setempat.
2.	Limbah padat	Destinasi menjamin limbah padat ditangani dengan baik dan dialihkan dari tempat pembuangan sementara atau akhir, dengan menyediakan suatu sistem pengumpulan daur-ulang yang secara efektif memisahkan limbah berdasarkan jenisnya. Destinasi mendorong badan-badan usaha untuk menghindari, mengurangi, memakai-ulang dan mendaur-ulang limbah padat, termasuk limbah makanan.
3.	Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim	Badan-badan usaha didorong untuk mengukur, memonitor, mengurangi atau meminimisasi, melaporkan secara terbuka dan memitigasi emisi gas rumah kaca dari semua aspek operasi mereka (termasuk dari pemasok dan pemberi jasa).
4.	T r a n s p o r t a s i berdampak rendah	Peningkatan penggunaan kendaraan rendah emisi dan berkelanjutan dan pelancongan aktif (jalan kaki dan bersepeda) dianjurkan untuk mengurangi sumbangan kegiatan pariwisata terhadap pencemaran udara, kemacetan dan perubahan iklim.
5.	Pencemaran cahaya dan kebisingan	Tersedia panduan dan peraturan untuk meminimalkan pencemaran cahaya dan kebisingan. Destinasi mendorong badan usaha untuk mengikuti panduan dan peraturan tersebut.

Sumber: Permenparekraf 9/2021

5. Faktor Environment (Ekologi/Lingkungan)

Aktivitas di sektor pariwisata dapat menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius seperti pada destinasi-destinasi wisata. Pembangunan sektor industri pariwisata tentu memberi konsekuensi terhadap kerusakan lingkungan sekitarnya dibalikinya meningkatnya pertumbuhan kesejahteraan/ekonomi karena pembangunan

Selanjutnya, berdasarkan 10 kriteria terkait *Community Based Tourism* ASEAN, Kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu standar untuk melestarikan sumber daya alam, dan standar untuk mempromosikan praktik ramah

⁵⁴ Ais Tsurayya Mumtaz and Mila Karmilah, "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata", Jurnal Kajian Ruang, 1(1), (2021).

⁵⁵ Lathif Arafat, "Faktor Eksternal Industri Pariwisata Di Kota Padang Dengan Pendekatan Pestel Analysis," Jurnal Pariwisata Pesona, 3(1), Desember (2018): 145–57.

⁵⁶ Sunawan, "Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Gunungkidul," Jurnal Widya Pranata Hukum, 1(2), (2019).

lingkungan di masyarakat.⁵⁷ Berikut ini adalah standar pengelolaan untuk melestarikan dan mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Standar untuk melestarikan sumber daya alam
 - Sumber daya alam dan situs yang sensitif terhadap lingkungan dan signifikansi komunitasnya diidentifikasi, direncanakan, didokumentasikan, dan didukung oleh komunitas yang relevan.
 - Dana ada untuk mendukung program dan tindakan konservasi berbasis masyarakat.
 - Program ada untuk menyajikan nilai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
 - Aturan dan peraturan lokal ada yang relevan dengan perlindungan dan penyajian alam
- b. Standar untuk mempromosikan praktik ramah lingkungan di masyarakat
 - Dana tersedia untuk mendukung tindakan perbaikan lingkungan berbasis masyarakat.
 - Ada sistem pengelolaan limbah padat yang sesuai secara lokal yang menerapkan prinsip menghindari, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan penanganan higienis limbah yang dapat dibuang (misalnya, pengomposan).

meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan dampak lingkungan.

- Praktik memastikan bahwa semua aturan, peraturan, dan undang-undang yang relevan dengan perlindungan lingkungan diikuti.
 - Pembangunan limbah padat secara aktif tidak dianjurkan (misalnya, melalui mendorong mengisi ulang botol air dengan air yang diolah).
 - Informasi lingkungan dan program pendidikan tersedia untuk tuan rumah, tamu dan masyarakat.
 - Sumber energi karbon rendah digunakan dalam area CBT
6. *Faktor Law (Hukum/Regulasi)*

Perlindungan hukum sektor pariwisata diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya meliputi memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu dalam pembangunan pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. Pembangunan desa wisata

Tabel 4. Peraturan Terkait Pengembangan Desa Wisata

Peraturan	Keterangan
UU. No. 10 Tahun 2009	Kepariwisata
PP No. 50 Tahun 2011	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025
Perpres No. 18 Tahun 2020	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 – 2024
Permenparekraf No. 12 Tahun 2020	Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2020 – 2024
Permen Kelautan dan Perikanan No. 93/PERMEN-KP/2020	Desa Wisata Bahari
Permenparekraf No. 9 Tahun 2021	Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah terkait Desa Wisata

Sumber: Hasil Analisis Tim Penulis, 2022

- Pengelolaan air limbah yang sesuai secara lokal menggunakan teknologi yang

dapat dilakukan dengan pengembangan strategi dalam peningkatan kapasitas sumber daya lokal.

Sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2011, strategi peningkatan dapat dilakukan dengan meningkatkan

⁵⁷ ASEAN, Asean Community Based Tourism Standard (Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2016).

pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata; meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung oleh pemerintah salah satunya dengan program pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/ BUMDes bersama sesuai dengan Perpres No. 18 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Pusat akan mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk transformasi ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Permenparekrif No. 12 Tahun 2020 mencanangkan pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota serta pengembangan wisata pedesaan akan mendorong pelestarian alam (antara lain bentang alam, persawahan, sungai, danau) yang pada gilirannya akan berdampak mereduksi pemanasan global.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan desa wisata digunakan sebagai sarana membangun desa secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa. Jumlah desa wisata hingga tahun 2022 telah mencapai 3.524 desa dengan 11 desa diantaranya telah masuk kedalam kategori desa wisata mandiri dengan peningkatan pada sektor infrastruktur; higienis, kebersihan, dan kesehatan; serta kesiapan

informasi teknologi. Selanjutnya, pengembangan desa wisata secara berkelanjutan memiliki kontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atas pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal dengan menganut tiga aspek yaitu *economic* (*prosperity*), *ecological* (*planet*), dan *social & cultural* (*people*).

Penyusunan strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan dengan menggunakan PESTEL analysis, menghasilkan hal-hal sebagai berikut 1) aspek politik, pengembangan desa wisata dilakukan sesuai arah kebijakan nasional salah satunya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) aspek ekonomi, pengembangan desa wisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan kontribusi PDB pariwisata dan penerimaan devisa sektor pariwisata. Selain itu juga, pengembangan desa wisata dapat memanfaatkan pendanaan dana desa secara efektif dan efisien; 3) aspek sosial, pengembangan desa wisata dapat selaras dengan beberapa indikator TTCI, yaitu salah satunya terkait pengembangan tenaga kerja dari sektor pariwisata yang masih terus menjadi perhatian dari sisi kuantitas dan kualitas; 4) aspek teknologi, pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan desa wisata sebagai media promosi dan *branding*; 5) aspek *environment*, pengelolaan lingkungan seperti limbah dan emisi dalam masing-masing destinasi wisata guna mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan; 6) aspek *law*, peraturan mengenai pengembangan desa wisata telah banyak diterbitkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah.

B. Saran

Dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang dapat berdiri secara mandiri dan menjadi keunggulan destinasi pada masing-masing daerah, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagaimana berikut: a) meningkatkan atraksi, aksesibilitas, dan amenities di masing-masing desa wisata; b) memberdayakan masyarakat dan penguatan kewirausahaan dalam pengembangan desa wisata; c) meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas SDM desa wisata agar dapat memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan; d) mempercepat program akselerasi pengembangan desa wisata dengan kolaborasi antar *stakeholders*; e) memanfaatkan teknologi digital dalam rangka promosi dan branding desa wisata agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta ekonomi sekitar; f) melaksanakan pengelolaan limbah secara mandiri dan terpadu serta dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal lainnya dalam pemanfaatan limbah sampah pariwisata; g) Berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan; dan h) memanfaatkan sumber pendanaan seperti dana desa secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antara, M., and I.N.S. Arida. *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. Bali: Universitas Udayana, 2015.
- ASEAN. *Asean Community Based Tourism Standard*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2016.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth edit. Los Angeles: SAGE Publications Sage CA, 2018.
- Pearce, Jhon A., and Richard Robinson, Jr. *Strategic Management: Formulation, Implementation and Control*, 12th Ed. Jakarta: Mc Graw-Hill Education and Salemba Empat, 2013.
- Aryani, V., D. Rahadian, A. D. Axioma, T. Nasution, D. Yogantoro, M. H. Hutagalung, S. Marbun. *Buku Pedoman Desa Wisata*. 1st ed. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019.
- Wirdayanti, Agnes, Amanah Asri, Bambang Dwi Anggono, Dwi Rudi Hartoyo, Enny Indarti, Hasyim Gautama, Hermin Esti. *Pedoman Desa*

Wisata. II, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021.

Jurnal

- Abahre, Jafar, and Samer Raddad. "Impact of Political Factor on the Tourism Development in Palestine: Case Study of Sabastiya Village." *American Journal of Tourism Management*, 5(2), November 27, (2016): 29–35. <https://doi.org/10.5923/j.tourism.20160502.01>.
- Adhanisa, C., and A. Fatchiya. "Efektivitas Website Dan Instagram Sebagai Sarana Promosi Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Sains Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*, 1(4), (2017): 451–66.
- Ananda, Ibnu, and Teduh Dirgahayu. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata di Indonesia: A Systematic Literature Review." *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(4), Desember (2021): 2291–2302.
- Andriyani, Digna Merian., and I. Nyoman. Sunarta. "Pengelolaan Desa Wisata Belimbing Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan Pupuan, Kabupate Tabanan, Bali." *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(1), (2015).
- Arafat, Lathif. "Faktor Eksternal Industri Pariwisata Di Kota Padang Dengan Pendekatan Pestel Analysis." *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(1), Desember (2018): 145–157.
- Atmoko, T Prasetyo Hadi. "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman." *Media Wisata*, 12(2), (2014).
- Kara, Ergün. "A Contemporary Approach For Strategic Management in Tourism Sector: PESTEL Analysis on The City Muğla, Turkey." *Journal of Business Research - Turk*, 10(2), (2018): 598–608. <https://doi.org/10.20491/isarder.2018.446>.
- Lily Dianasari, Dewa Ayu Made. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Lingkungan Fisik di Desa Wisata di Bali." *Jurnal*

- Kepariwisata, 20(2), September (2021): 99–106. <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i2.469>.
- Ma'ruf, M. F., B. Kurniawan, and R.P.A.G. Pangestu. "Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, (2017).
- Maulana, Muhammad Yahya, and Sulistyowati. "Peran Generasi Pesona Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata di Jawa Tengah Dengan Perspektif Community Development." *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), (2018). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21944>.
- Muljanto, Muhammad Agus. "Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), (2021): 169–81. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>.
- Mumtaz, Ais Tsurayya, and Mila Karmilah. "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata." *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), Maret (2021).
- Nicolae, Platon. "Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova." *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, XVIII(1), (2018).
- Nicula, Virgil, and Simona Spânu. "Pestel Analysis Applied in Tourism Evaluation in Braila County." *Revista Economică*, 71,(3), (2019): 54–68.
- Rahmawati, Aulia. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Dalam Mendukung SDG'S Desa." *Journal of Public Power*, 5(2), (2021): 151–58. <https://doi.org/10.32492/jpp.v5i2.628>.
- S., Kumar, and Shekhar. "Technology and Innovation: Changing Concept of Rural Tourism-A Systematic Review." *Open Geosci*, 12(1), (2020): 737–52.
- Sudibya, Bagus. "Wisata Desa dan Desa Wisata." *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), January (2018): 22–26. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>.
- Sunawan. "Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), (2019).
- Temiraliyeva, Zubaira, Karlygash Abdykulova, Gulnara Baibasheva, Zhassulan Sadykov, Gulmira Nakipova, and Layly Tokaeva. "Economic Analysis and Factors Influencing the Development of Tourism." *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(8), (2021). <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/6655>.
- Utomo, Selamat Joko, and Bondan Satriawan. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang." *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), (2017).
- Yüksel, Ihsan. "Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis." *International Journal of Business and Management*, 7(24), November (2012). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n24p52>.

Prosiding dan Seminar

- Gregoric, Marina. "PESTEL Analysis of Tourism Destinations in the Perspective of Business Tourism (MICE)." Makalah dipresentasikan pada Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry, University of Rijeka, Faculty of Tourism & Hospitality Management, 2014.
- Irwan, and Andi Agustang. "Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan." Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19, 2021.
- Putra, Nanda Dwi, and Teduh Dirgahayu. "Strategi Pemanfaatan TIK Untuk Promosi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta." Makalah

dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Geotik, 2021: 206–18.

Sirait, Robby Alexander, and Emillia Octavia. “Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020.” *Analisis Ringkas Cepat*, 01/ARC.PKA/III/2021, 2020.

Syah, Firman. “Strategi Mengembangkan Desa Wisata.” Makalah dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (SENDI_U3), 2017.

Sumber Digital

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja (Persen), 2015-2019.” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/6/1190/1/jumlah-pekerja-pada-industri-pariwisata-dalam-proporsi-terhadap-total-pekerja.html> (diakses 17 Mei 2022).

———. “Laporan Perekonomian Indonesia 2021.” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/17/f3ece7157064514772b18335/laporan-perekonomian-indonesia-2021.html> (diakses 17 Mei 2022).

Kememparekraf. “Jaringan Desa Wisata.” Kememparekraf. <https://jadesta.kememparekraf.go.id/home> (diakses 17 Mei 2022)

———. “Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas.” Kememparekraf. <https://kememparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas> (diakses 17 Mei 2022)

———. “Jumlah Desa Wisata Mandiri.” Kememparekraf. <https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/kategori/74> (diakses 17 Mei 2022).

Limanseto, Haryo. “Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.” Kememparekraf. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa->

wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi (diakses 17 Mei 2022).

United Nations. “Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism.” United Nations. https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf, (diakses 15 Mei 2022)

WEF. “Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019.” World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf (diakses 17 Mei 2022).

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

———. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (n.d.).

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) (n.d.).

Sastrayuda, G.S. Konsep Pengembangan Desa Wisata. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort And Leisure. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

UNEP, and UNWTO. Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers. United Nations, 2005.

UNWTO. Best Tourism Villages. 2021.

